Borneo Tribune

Selasa, 23 Agustus 2011

Penyerahan Hasil Pemantauan TLHP Semester I

2404 Temuan, Rekomendasi Meningkat 12 Persen

Abdul Khoir
Borneo Tribune, *Pontianak*

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Lanjut Pemeriksaan (TLHP) semester 1 ke eksekutif dan legislatif baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalbar, Senin (22/8) kemarin.

Dari hasil TLHP yang diterima jajaran eksekutif dan legislatif, masih banyak disampaikan poin-poin yang belum mendapat respon dan tindak lanjut dari masing-masing daerah.

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kalbar, Hadi Sudibyo, TLHP tersebut merupakan wujud dari tindak lanjut kesepakatan bersama antara BPK RI dengan DPRD se Kalbar dalam penyerahan laporan BPK RI.

Seperti tertuang dalam pasal 20 ayat 3 Undang-undang nomor 15 tahun 2004 menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan oleh pejabat BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima.

"BPK RI melakukan penelahaan terhadap dokumen tindak lanjut yang telah disampaikan untuk menentukan status tindak lanjut apakah telah sesuai atau belum sesuai dengan rekomendasi," kata Hadi Sudibyo.

Dikatakannya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2010 tentang pedoman dan pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut pemeriksaan BPK, seharusnya dapat menjadi pedoman DPRD untuk mendorong efektifitas dari tindak lanjut pemeriksaan BPK.

"Peran sentral DPRD akan semakin kuat, oleh karena itu koordinasi antara tiga pihak yakni BPK, DPRD dan eksekutif dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah perlu ditingkatkan," imbuhnya.

Sampai dengan semester satu tahun 2011, BPK RI telah melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap 15 entitas yang ada di Kalbar, mencatat 2404 temuan dan 4898 rekomendasi.

Dari temuan dan rekomendasi tersebut, mengalami peningkatan sebanyak 12 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang tercatat 2144 temuan dan 4313 rekomendasi. Dari 4849 rekomendasi yang telah diterima BPK sejumlah 2740 atau 57 persen telah sesuai dengan tindak lanjut, dan sejumlah 1339 atau 28 persen rekomendasi belum sesuai dengan tindak lanjut dan 770 atau 16 persen belum ditindaklanjuti.

Secara relative, BPK RI mencatat peningkatan yang menggembirakan dalam tindak lanjut yang dilakukan pemerintah dengan membandingkan dengan tahun lalu.

Untuk tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi terdapat peningkatan sebanyak 10 persen jika dibandingkan dengan posisi semester dua tahun lalu, sedangkan untuk tindak lanjut yang telah dilakukan namun belum selesai terjadi penurunan dari 30 persen menjadi 28 persen.

"Dari progress, bisa dikatakan pemerintah daerah di Kalimantan Barat telah menunjukkan usaha yang keras untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI," katanya lagi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya yang hadir mewakili pemerintah Provinsi Kalbar mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh BPK RI adalah demi keb
ikan dan bukan mencari k
salahan sebuah pelaksan
an pemerintahan.

Dan dari hasil pemeriks
an BPK yang salah satun
bertujuan menjadikan seb
ah penyelenggaran pemer
tahan dalam pengelola
keuangan yang lebih ba
yang disajikan dalam be
tuk data seharusnya dap
menjadi sebuah masuk
dan ditindaklanjuti deng
kebijakan. "Data-data i
harus menjadi perhati
dalam mengambil kebija
an oleh pimpinan," kata W
kil Gubernur Kalbar, Chr
tiandy Sanjaya. □